

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru*, Grafiti, Jakarta.
- Abdul Muis Yusuf, 2011, *Hukum Kehutanan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Joko Subagyo, 1992, *Hukum Lingkungan masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kurnia Warman dkk, 2022, *Pengelolaan Hutan Nagari: Dari Nagari Untuk Indonesia*, Andalas University Press, Padang.
- Mitchell B., Setiawan, B., & Rahmi, D.H. (2003). *Pengelolaan sumber daya dan lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Sjamsidi dkk, 2013, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, UB Press, Malang.
- Nurullah, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press, Padang.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers/PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Salim H.S., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Jurnal

- Abrar Saleng, 2007, Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Para Pihak), *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 2, hlm. 5.
- Andrew Shandy Utama, 2017, Eksistensi Nagari di Sumatera Barat Sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Jurnal Equitable*, Vol. 2, No. 1, hlm. 82.
- Dyland Perdana Chandra, Kurnia Illahi Manvi, 2022, Tinjauan Daya Tarik Wisata Puncak Kabun Lereng Singgalang Di Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, hlm. 8470.
- Erik Rachman, 2022, Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Kelestarian Kawasan Jalur Pendakian Gunung Singgalang Via Pandai Sikek, *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 9, Edisi 1 Januari-Juni 2022, hlm. 6.
- Erni Mukti Rahayu, Joko Triwanto, 2021, Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang, *Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926)*, Vol. 03, No. 02, hlm 545.
- Mitchell B., Setiawan, B., & Rahmi, D.H. (2003). Pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Setio Adiningsih Puspitasari, Herlina J. R. Saragih, & R. Djoko Andreas Navalino, 2019, Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi), *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 5, Nomor 1, hlm.124.
- Slamet Edi Sumanto, 2009, Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 13.
- Syofiarti, Titin Fatimah, & Kevin Muhammad Yades, 2023, Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Issue 4, hlm. 447.

D. Sumber Internet/ Berita

- Abdurrahman, 1996, *Kedudukan Hak Ulayat dalam Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Makalah Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya tanggal 20 April 1996).

Baginda Syah Ali, 2016, Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, Universitas Pendidikan Indonesia: <http://repository.upi.edu/21523/>

BPS Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Paparan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Desa-Perhutanan Sosial: <https://pkps.menlhk.go.id/assets/file/literatur/20230124030515-literatur-buku-saku-fasilitasi-permohonan-hutan-desa.pdf>

Data Monografi Nagari Singgalang

Kajian Literatur: http://eprints.undip.ac.id/58271/4/BAB_II.pdf

http://repository.uin-suska.ac.id/14005/7/7.%20BAB%20II_2018938PAI.pdf

https://www.google.com/url?q=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kawasan&sa=U&ved=2ahUKEwj80rLNk4uDAxWTqmMGHXzBC9cQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw0V_dwaB0eC941wT4NpAjhG

<https://langgam.id/nagari-singgalang-sepuluh-koto-kabupaten-tanah-datar/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia:

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel>

Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lampiran IV-6 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021